



Keamanan Maritim Indonesia dalam Pembangunan Poros Maritim Dunia

Baskoro Novilandhi¹, Akhiyar Meideri², Maswir³

^{1,2,3}Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: baskoronovilandhi@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-06-23 Revised: 2024-07-21 Published: 2024-08-04 Keywords: <i>Security;</i> <i>Maritime Axis;</i> <i>World.</i>	Indonesia has made a maritime strategy approach in the form of developing the World Maritime Axis (PMD). PMD introduces a further concept of the maritime security and strategy approach that Indonesia has previously proposed. The Indonesian Navy (TNI AL) as the organizer of defense at sea is an actor who carries out its functional duties as an implementer in the development of PMD. So this article is to explore the concepts related to change or continuity, which relate to maritime security and strategy in PMD, especially the role of the TNI AL in preparing for the development of PMD. The results of the study show that PMD is a change from the previous maritime strategy. Then maritime security is the main task of the TNI AL which must be supported by the government to strengthen the development of maritime security in the development of PMD.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-06-23 Direvisi: 2024-07-21 Dipublikasi: 2024-08-04 Kata kunci: <i>Keamanan;</i> <i>Poros Maritim;</i> <i>c.</i>	Indonesia membuat pendekatan strategi kemaritiman berupa pembangunan Poros Maritim Dunia (PMD). PMD memperkenalkan konsep lebih lanjut tentang pendekatan keamanan dan strategi maritim yang pernah diusung Indonesia sebelumnya. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) sebagai penyelenggara pertahanan di laut menjadi aktor yang menjalankan tugas fungsinya sebagai pelaksana dalam pembangunan PMD. Maka tulisan ini adalah untuk mengeksplorasi tentang konsep – konsep terkait dengan perubahan atau kesinambungan, yang berkenaan dengan keamanan dan strategi maritim dalam PMD khususnya peran TNI AL dalam mempersiapkan pembangunan PMD. Hasil penelitian bahwa PMD merupakan perubahan dari strategi maritim sebelumnya. Kemudian keamanan maritim adalah tugas pokok TNI AL yang harus di dukung pemerintah untuk memperkuat pembangunan keamanan maritim dalam pembangunan PMD.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terletak di *cross position* antara dua benua dan dua samudra. Sebagaimana dalam Wawasan Nusantara yang diperkenalkan pada era Suharto, masyarakat secara umum memahaminya NKRI sebagai sebaran pulau saja yang disebut 'zamrud khatulistiwa'. Tanpa kemudian melihat laut yang terdapat di tengah-tengah antara satu pulau dengan pulau yang lain merupakan penghubung. Terlebih dalam posisi ini Indonesia dipandang sebagai arsipelago atau kepulauan, sehingga memiliki posisi yang berbeda di antara negara-negara dengan kriteria geografis berdasarkan perairan lainnya yang terdiri dari negara pantai, kontinental dan *landlocked* (Susanto, 2015).

Peran strategis Perairan Indonesia ke depan sebagai jalur pelayaran dunia akan semakin penting sejalan dengan meningkatnya permintaan energi dan sumber daya alam (SDA) lainnya, yang diperkirakan pada tahun 2040 akan meningkat 56%. Perairan Indonesia utamanya Selat Malaka, serta Selat Hormuz, Terusan Suez

dan Terusan Panama dianggap sebagai jalur penting dan kritis bagi perdagangan dunia. Secara umum kawasan regional Asia Tenggara dipandang penting bagi negara – negara di dunia sebagai jalur komunikasi laut (*Sea lines of Communication / SLOC*) dan jalur perdagangan laut (*Sea Lines of Trade / SLOD*) yang vital bagi perdagangan internasional (Geoffrey, 2009).

Visi pemerintahan saat ini merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan yang harus ditindaklanjuti dengan langkah cermat dan tepat oleh TNI secara umum, serta TNI Angkatan Laut (TNI AL) secara khusus, untuk mendukung program pemerintah dalam membangun Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Sesuai dengan program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah, maka aspek pertahanan dan keamanan maritim menjadi hal penting yang harus dibenahi karena keamanan di wilayah laut Indonesia menjadi faktor penentu kesuksesan program pemerintah tersebut.

Konsep poros maritim dunia yang diinstruksikan oleh presiden tersebut kemudian

dijabarkan menjadi lima pilar penting yaitu pembangunan kembali budaya maritim, menjaga dan mengelola laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan, mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim serta penguatan pertahanan maritim. Dari ke lima pilar tersebut, terdapat dua pilar yang sangat berkaitan dengan pertahanan serta keamanan yaitu pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim serta penguatan pertahanan maritim. (Yusrah, 2017).

Oleh karena itu diperlukan sebuah strategi maritim komprehensif yang luwes dihadapan paradoks perubahan zaman yang semakin dinamis dengan isu – isu kemaritiman yang terus berkembang. Sebagaimana (Sloggett, 2013) dalam bukunya “*The Anarchic Sea*” mengatakan bahwa terdapat tujuh dimensi atau perspektif pada strategi maritim kontemporer yang terdiri dari *state to state*, perlindungan dagang, manajemen sumber daya laut, penyelundupan, terorisme, bencana alam dan oseanografi. Alih – alih pakem strategi maritim Indonesia mirip dengan konsepsi yang diajukan Mahan dan Corbett yang menghendaki penguasaan total atas laut sekaligus mengontrol dalam bentuk *command of the sea*, Indonesia justru sedang lepas landas dari paradigma daratan dan mencari batu pijakan selanjutnya setelah Deklarasi Kepulauan 1957 oleh Perdana Menteri Juanda serta perjuangan di UNCLOS melalui diplomasi maritim yang dirintis Mochtar Kusumaatmaja dan Hasyim Djalal.

Maka pencapaian visi PMD harus berbanding lurus dengan kondisi stabilitas nasional. Dengan kata lain, pembangunan keamanan maritim yang berhasil hanya dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh pertahanan dan keamanan yang tangguh, baik dalam lingkup nasional, regional maupun global. Dengan demikian, TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut yang mengemban fungsi penangkal, penindak dan pemulih keamanan nasional wajib menjalankan tugasnya untuk menegakkan kedaulatan bangsa di laut, maka kolaborasi konsep pembangunan kekuatan TNI AL dengan konsep pembangunan keamanan maritim harus sejalan, integratif, saling mengisi dan memperkuat satu sama lainnya.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi literatur. Selanjutnya terkait data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, di mana data sekunder umumnya dalam bentuk bukti, catatan

atau laporan historis yang telah dikompilasi dalam arsip atau data dokumenter, baik yang diterbitkan maupun yang tidak dipublikasikan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keamanan Maritim

Dalam pemikiran hubungan internasional konsep tradisional, keamanan maritim terutama dianggap sebagai masalah kekuatan laut (komando laut). Di masa damai, kekuatan laut dikaitkan dengan negara – negara yang mengamankan kemampuan untuk melakukan transportasi dan perdagangan melalui laut. Dalam masa perang, kekuatan laut menggambarkan keagenan angkatan laut untuk menyerang angkatan laut lain atau alat transportasi laut negara lain. (Till, 2018). Definisi terbaru lainnya melihat keamanan maritim sebagai “Perlindungan tanah negara dan wilayah maritim, infrastruktur, ekonomi, lingkungan dan masyarakat dari tindakan berbahaya tertentu yang terjadi di laut”. (Klein, 2011).

Keamanan maritim lebih memuat konsep keamanan non – tradisional. Namun jika dilihat secara lebih jauh, muatan seperti ini tidak berarti pula bahwa peranan dari negara khususnya pelibatan sektor militer (Angkatan Laut) dalam penanganannya menjadi tidak penting. Sesungguhnya laporan kepada Sekjen PBB menyebutkan kebutuhan adanya penguatan kerja sama dan koordinasi yang terpadu pada semua tingkatan, baik internasional dan regional maupun pada tataran instansi pemerintah (*agency*). Dalam kaitannya dengan pelibatan *agency* yang berurusan dengan militer, laporan itu misalnya menyambut baik penyelenggaraan *Indian Ocean Naval Symposium* yang diadakan pada 15 Februari 2008 dan juga menghimbau koordinasi antara polisi, *border forces* juga instansi terkait untuk menangani ancaman transnasional.

2. Sejarah Kemaritiman Indonesia

Sejarah kemaritiman Indonesia membuktikan bahwa NKRI merupakan legasi dari negara – bangsa maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit yang hidup pada abad ke – 5 hingga pertengahan abad ke – 14. Kesuksesan dari Sriwijaya dalam membangun *hub ports* terkemuka di kawasan Asia Tenggara dan Majapahit dengan lima armada kapal perang terkuat pada zamannya menjadi sebuah titik

balik sejarah akan kejayaan Indonesia di masa lampau akan strategi kemaritiman yang kaya. Sekaligus menunjukkan bahwa khalayak masih belum mengeksplorasi 100% tentang wawasan kebahariannya (Susilo, 2015). Kedua hal ini yang menjadi citra diri nasional positif di era jauh sebelum PMD diluncurkan sebagai wacana publik yang mengundang perhatian.

Sedangkan pengalaman kelam di era penjajahan Belanda dengan pembatasan masyarakat terhadap laut dengan salah satunya menganggap nelayan sebagai kasta terbawah dalam masyarakat (Toer, 2015). Dengan demikian trajektori strategi yang akan dicapai adalah mencapai negara bahari sebagaimana Sriwijaya dan Majapahit sebagai kekuatan regional terkemuka. Misalkan pada akhir era orde lama, pengadaan KRI Irian menjadi salah satu senjata utama untuk mewujudkan trajektori tersebut (Miller, 2001).

Negara berperan cukup besar dalam strategi maritim, namun cenderung bersikap *inward looking* melihat dari persepsi ancaman pada era pra PMD. Dibuktikan dengan berbagai macam pemberontakan yang terjadi di dalam negeri seperti DI/TII, PRRI/Permesta, Kahar Muzakar, Andi Azis, Westerling, APRA, dan ancaman-ancaman dari luar untuk membentengi pengaruh ideologi asing. Ideologi yang dimaksud dalam batasan tertentu juga mengalami pergeseran dari zaman orde lama ke orde baru, yakni menempatkan kekuatan nekolim seperti AS, Inggris dan Belanda sebagai ancaman utama pada era orde lama dan tidak lama berubah menjadi Tiongkok dengan komunismenya. Belum lagi Pembangunan Lima Tahun yang dicanangkan Suharto juga membuat strategi maritim sebagai subordinasi dari strategi daratan pada sebuah administrasi junta militer yang dipimpinnya (Booth, 1992). Selain itu laut dianggap sebagai parit untuk membentengi ancaman - ancaman dari luar, militer menempatkan Angkatan Laut pada lapisan pertahanan terdepan pada doktrin CADEK dan Tri Ubaya Cakti dengan menempatkan kapal - kapal perang sebagai 'benteng' pertama ancaman dari luar (Widjajanto, 2005) hal ini dikarenakan pada dasarnya di era pra PMD ada kecenderungan isu - isu kemaritiman seperti yang disinggung oleh Sloggett dalam bukunya (2013) kecenderungan tersebut lebih kepada *state to state*. Adapun contoh lain terkait dengan hal

tersebut dalam menghadapi tiga peristiwa besar seperti:

- a) Peristiwa Dwikora dengan mengkonfrontasi Malaysia dan hendak menganeksasi Kalimantan Utara
- b) Peristiwa Trikora dengan mengkonfrontasi Belanda dan merebut Irian Barat meskipun diselesaikan dengan diplomasi
- c) Peristiwa integrasi Timor Timur melalui Operasi Seroja.

3. Indonesia Dalam Pembangunan Poros Maritim Dunia

Kebijakan pertahanan (*defence policy*) diformulasikan sejalan dengan komponen - komponen kebijakan keamanan lainnya. Kebijakan pertahanan diarahkan untuk menangkal dan menghadapi bentuk ancaman yang berdimensi militer. Sementara respon terhadap bentuk - bentuk ancaman yang berdimensi non militer ditangani oleh aktor - aktor keamanan nasional lainnya. Peran angkatan bersenjata nasional Indonesia diarahkan oleh kebijakan pertahanan di mana kemudian mengarah pada analisis kebutuhan kapabilitas untuk menghadapi ancaman dan risiko yang telah identifikasi pada analisis strategis sebelumnya.

Pemerintah ingin mengembalikan kehidupan maritim Indonesia yang tercermin dari ditetapkannya agenda pembangunan yang bercorak maritim yang disebut sebagai Lima Pilar Utama guna mewujudkan Indonesia sebagai PMD. Hal ini disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia secara langsung pada acara pertemuan puncak negara - negara Asia Timur ke-9, *9th East Asia Summit (EAS)* di Myanmar, pada tanggal 13 November 2014 (Srenal, 2014) antara lain :

- a) Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau lebih, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya dan masa depannya, hal tersebut sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudra.
- b) Komitmen untuk menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim akan digunakan sebesar - besarnya untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.
- c) Komitmen untuk mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas

maritim, dengan membangun Tol Laut, pelabuhan laut dalam, logistik dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. (Ade, 2015).

- d) Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra – mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan. Bersama-sama kita harus menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan dan pencemaran laut.
- e) Sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudra, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. (Ade, 2015).

Perbedaan latar belakang diikuti pula dengan peran negara yang semakin aktif dalam mengeksekusi kemaritiman. Mengingat PMD berarti membuka laut selebar – lebarnya untuk meningkatkan keunggulan ekonomi bangsa dan negara. Untuk itu pemerintah membentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang bertugas melakukan koordinasi pada isu – isu prioritas strategis seperti pengelolaan sumber daya migas hingga mineral, pengembangan destinasi pariwisata, penyelenggaraan program tol laut dan juga regulasi perikanan yang didalamnya menegaskan untuk kembali menegakkan peraturan hukum laut internasional (Kompas, 2014).

Persepsi ancaman juga dapat dikatakan mengalami pergeseran dari yang semula merupakan geopolitik Perang Dingin yang diiringi dengan bumbu konfrontasi, kemudian bergeser menjadi geoekonomi. Sehingga dalam batasan ini peran pemerintah menjadi lebih *outward looking* dalam menjalankan strategi kemaritiman untuk mewujudkan visi PMD. Visi Indonesia juga mengalami pergeseran yang semula mematok diri dengan klaim bahwa sebagai pemimpin ASEAN, Indonesia menjadi garda terdepan diplomasi di Asia Tenggara sekaligus menempati posisi istimewa dalam forum regional tersebut. Justru di era ini Indonesia memformulasikan suatu kebijakan luar negeri dan diplomasi di Asia Tenggara sekaligus menempati posisi istimewa dalam forum regional tersebut dengan memperkenalkan

konsep *middle power* atau kekuatan menengah terkemuka di Indo-Pasifik (Kurlantzick, 2014).

Kendati mengalami perbedaan latar belakang, citra diri nasional relatif tidak ada yang berubah. Misalnya, tetap menggunakan legasi kejayaan maritim Sriwijaya dan Majapahit untuk menunjukkan khazanah budaya bangsa bahari terhadap khalayak luas. Misalnya dibuktikan dengan pernyataan Jokowi pada saat diwawancara, Jokowi mengatakan bahwa PMD harus diyakini hal ini mengingat Sriwijaya dan Majapahit sudah pernah menguasai lautan pada zamannya (Pikiran Rakyat, 2015). Persepsi sejarah positif tersebut juga diwarnai persepsi sejarah negatif dalam citra diri nasional Indonesia yang mana di era pemerintahan terdahulu dinilai kurang berhasil dalam melakukan eksekusi strategi maritim, hal ini juga ditandai oleh pidato Jokowi pada pelantikannya tanggal 20 Oktober 2014. Menurutnya, Indonesia sudah lama memunggungi laut dan samudra (Detik News, 2014). Kutipan dalam pidato ini dapat diartikan bahwa dalam kurung waktu hampir setengah abad, strategi kemaritiman seolah dilupakan dengan menempatkannya pada subordinasi daratan.

Pandangan negara terhadap posisinya juga mengalami pergeseran cukup signifikan. Ditandai dengan komitmen pemerintah untuk membangun *hub ports* terlebih memahami posisi *chokepoint* Indonesia di antara dua samudra dan dua benua untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam meningkatkan kapabilitas ekonomi. Salah satunya dengan membangun sarana prasarana untuk memperlancar alur rute pelayaran yang telah ada dengan meningkatkan frekuensi dan juga membangun serta memaksimalkan infrastruktur yang ada.

4. Tantangan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

Indonesia sampai saat ini masih menghadapi tantangan di bidang keamanan laut. Dalam hal tata kelola dan pengamanan akses laut Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Namun dalam praktiknya di lapangan terdapat masalah teknis yang memerlukan penanganan lebih teliti. Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Bakamla (Badan Keamanan laut) berkewajiban melaksanakan fungsi di bidang keamanan. Di sisi yang lain, TNI AL

berkewajiban melaksanakan fungsi dibidang pertahanan sesuai dengan amanah Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya Pasal 58 ayat (1) dan (2). Kemudian, pengamanan maritim menjadi tantangan sendiri bagi TNI AL dan Bakamla (Badan Keamanan Kelautan), yang mana secara kontradiktif bahwa keamanan maritim adalah fungsi penegakan hukum di perairan nasional yang dilaksanakan oleh lembaga penegakan hukum sipil (Widjojo, 2015; Dinarto, 2016).

Dengan mempertimbangkan rumitnya masalah yang ada di sekitar Perairan Indonesia, dibutuhkan kerja sama dan tindak tegas dari pemerintah dan jajaran di bawahnya untuk mengimplementasikan kebijakan demi kedaulatan wilayah Indonesia. Masalah pengelolaan wilayah laut Indonesia sangat kompleks dan harus diperhatikan, hal ini dikarenakan permasalahan tersebut tidak hanya tentang eksplorasi kekayaan laut Indonesia, perompakan, penyelundupan, waktu *dwelling* (bongkar muat kapal), regulasi kebijakan cukai, hingga masalah ketimpangan di wilayah pesisir, sehingga hal ini yang menyebabkan usaha pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim masih dan terus diupayakan.

Untuk dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan Indonesia menjadi PMD, TNI AL harus memiliki kekuatan dan kemampuan yang sesuai dalam menjawab tantangan yang terjadi dalam lingkungan strategis yang ada. Oleh sebab itu, TNI AL perlu membangun kekuatan dan kemampuannya sejajar dengan angkatan laut negara maju lainnya. Peneliti sejarah angkatan laut, Anthony Bruce, Direktur Kebijakan pada Komite Penasehat Perdana Menteri Inggris dan William Cogar, guru besar sejarah angkatan laut di Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat menyimpulkan bahwa di negara manapun, angkatan laut selalu dituntut untuk mampu mendukung kepentingan nasional negaranya. (Anthony, 1998). Dengan kondisi demikian, maka angkatan laut sejak pembentukannya dituntut harus memiliki kualitas sebagai angkatan laut kelas dunia. Hal ini juga relevan dengan teori peran tradisional angkatan laut secara universal yang dikemukakan Ken Booth, secara tradisional angkatan laut memiliki tiga peran, yaitu peran militer, diplomasi dan *constabulary*. (Booth, 1977).

Peran militer dibentuk karena karakter militansi sebagai angkatan bersenjata, peran diplomasi diadakan karena melaksanakan tujuan politik negara dan peran *constabulary* berkaitan dengan penegakan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi serta perlindungan terhadap kedaulatan wilayah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Penjelasan ini mempertegas pendapat bahwa pembentukan Angkatan Laut secara kualitatif harus mampu melaksanakan peran universal tersebut. Apabila Angkatan Laut telah mampu memenuhi tuntutan tugas sesuai peran universal dalam mengamankan kepentingan nasional di dalam maupun luar kawasan, maka secara kualitas dapat dikatakan Angkatan Laut tersebut telah berkelas dunia (*World Class Navy*).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Keamanan maritim dan strategi militer harus diperkuat dengan adanya pembangunan Poros Maritim Dunia agar mencapai pilar pengembangan keamanan dan pertahanan maritim. TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut harus berupaya secara maksimal mungkin untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuannya agar dapat melaksanakan tugas dan perannya dalam bidang pertahanan negara di laut serta mendukung kebijakan pemerintah khususnya dalam membangun sektor kemaritiman di Indonesia.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia Pada PKR Sigma 10514 dalam Meningkatkan Sumber Daya TNI Angkatan Laut.

DAFTAR RUJUKAN

- Anthony Bruce, William Cogar, (1998). *An Encyclopedia of Naval History*. Chicago, USA. Fitzroy Dearborn Publisher.
- Booth, Ken. (1977). *Navies and Foreign Policy*. London. Croom Helm.
- Klein, Natalie. (2011). *Maritime Security and the Law of the Sea*, Oxford University Press.

- Kompas.com, (2014). Jokowi: Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan!, Dalam <http://nasional.kompas.com/read/2014/11/18/13004411/Jokowi.Tenggelamkan.Kapal.Pencuri.Ikan>.
- Kurlantzick, Joshua, (2014). *Jokowi's Maritime Doctrine and What It Means*, ASEAN Beat, The Diplomat, <http://thediplomat.com/2014/11/jokowis-maritime-doctrine-and-what-it-means/>
- Pikiran Rakyat, (2015). *Kejayaan Ada di Laut Seperti Sriwijaya dan Majapahit*, Dalam <http://www.pikiranrakyat.com/ekonomi/2015/12/11/353353/kejayaan-ada-di-laut-seperti-sriwijaya-dan-majapahit>
- Srenal, (2014). *Salinan naskah terjemahan pidato Presiden Republik Indonesia pada 9th East Asia Summit*, Plenary Seasons, Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November.
- Strategi Maritim Amerika Serikat, (2015). *A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower*. Dalam <http://www.navy.mil/local/maritime/150227-CS21R-Final.pdf>,
- Till, Geoffrey (2018). *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*, *Cass Series: Naval Policy and History (4.th ed.)*. Milton. Routledge.